

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan Cetakan I, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Jakarta: PT Buku Seru.
- Asmaeny Azis Izlindawati, 2018, Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum, Jakarta: Kencana.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Glora Madani Press.
- Irwansyah, 2022, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi Cetakan V), Yogyakarta: Birra Buana Media.
- Jum Anggriani, 2012, Hukum Administrasi Negara Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kadarudin, 2021, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, 2018, Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia, Bengkulu: Zigie Utama.
- M. Solly Lubis, 2011, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju.
- Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Indonesia.
- Muji Estiningsih, 2005, Fungsi Pengawasan DPRD, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Nasution M. Nur, 2004, Manajemen Transportasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar), Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Philipus M. Hadjon et. al., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahardja Adisasmita, 2010, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, Jakarta: PT Graha Ilmu.
- Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, 2020, Pengawasan Pemerintahan, Bandung: CV Cendekia Press.
- Ratminto & Atik, 2003, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerepan Citizens Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan HR, 2017, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press.
- Sinambela L. P., 2011, Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi), Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin et. al, 2012, Hukum Pelayanan Publik, Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soewarno Handyaningrat, 2004, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, 2006, Pengantar Manajemen Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Suriansyah Murhaini, 2014, Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Syahrudin Nawi, 2017, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT Umitoha Ukhuwa Grafika.

Titik Triwulan T, 2016, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Kencana.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Usaha Pembenahan, Jakarta: Grasindo.

Yohanes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru: Marpayon Tujuh.

Jurnal

Achmadi, 2015, *Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah di Era Otonomi*, Antero Jurnal, Volume 14 Nomor 2.

Amir Ilyas et.al, 2020, Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 2, hlm. 353

Arini Nur Annisa, 2024, Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial, Asmir Law Jurnal Volume 5 Nomor 2, hlm. 106-107

Devina Tharifah Arsari, 2020, *Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jurist-Diction 3 Nomor 3.

Mutiara Hermawati et. al., 2024, *Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)*, Media Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

Safina Dwita Putri, Yayuk Sugiarti, dan Abshoril Fithry, 2024, *Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik di Tinjau Dari Perspektif UU No. 22 Tahun*

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Volume 10 Nomor 1, Universitas Wiraraja, Sumenep.

Robi, 2016, *Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Volume 7 Nomor 1, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 2 Ayat 2

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Internet

[https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/orangtua wajib tahu pengendara sepeda listrik minimal 12 tahun](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/orangtua_wajib_tahu_pengendara_sepeda_listrik_minimal_12_tahun), diakses pada 9 Oktober 2024

<https://www.jejaksulsel.com/daerah/pr-1656493491/ada-yang-kenal-pengendara-ini-dirawat-di-rsud-bulukumba-usai-tabrakan-dengan-sepeda-listrik>, diakses pada 9 Oktober 2024

<https://harian.fajar.co.id/2025/03/25/selama-ramadan-29-kecelakaan-lalu-lintas-di-bulukumba-dua-orang-meninggal-dunia/> diakses pada 28 Maret 2025